

**HINAAN PUBLIK SEBAGAI ALASAN MERINGANKAN PIDANA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 29/PID. SUS-TPK/2021/PN. JKT. PST)**

Abstrak

Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia selalu menjadi pembicaraan yang tak lekang oleh zaman. Salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi ialah dengan memperkuat sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku. Namun dalam menjatuhkan putusan, hakim harus merumuskan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Salah satu alasan peringanan dalam putusan Nomor 29/PID. SUS-TPK/2021/PN. JKT. PST yakni, Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tiga metode pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan Putusan No.29/Pid-Sus/TPK/2021/PN Jkt. Pst. belum memenuhi asas keadilan bagi masyarakat karena Hakim tidak mengakomodir unsur kerugian yang diderita masyarakat dan respon kecewa masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut malah dijadikan sebagai alasan meringkan hukuman korban. Selain itu penggunaan alasan cacian masyarakat sebagai alasan yang meringankan bagi terdakwa dapat memicu adanya ketimpangan terhadap perkara-perkara sebelumnya. Cacian masyarakat semestinya memberi peringatan bagi majelis hakim dalam memasukkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Sebab, hal tersebut menjadi fakta masyarakat merasa dirugikan atas perilaku terdakwa.

Kata Kunci: Korupsi, Alasan Peringanan Pidana, Covid-19.

**PUBLIC INSULT AS A REASON FOR CRIMINAL MITIGATION IN
CRIMINAL CASES OF CORRUPTION
(STUDY OF DECISION NUMBER 29/PID. SUS-TPK/2021/PN. JKT. PST)**

ABSTRACT

The phenomenon of corruption that occurs in Indonesia has always been a timeless discussion. One of the efforts to eradicate corruption is to strengthen criminal sanctions imposed on perpetrators. However, in making a decision, the judge must formulate aggravating and mitigating circumstances. One of the reasons for mitigating the decision No. 29/PID. SUS-TPK/2021/PN. JKT. PST namely, the Defendant has suffered enough to be reviled, cursed at, humiliated by the public. The method used in this study uses normative juridical law research methods which are carried out by examining literature or secondary data with three approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach.). The results of this study show that the Judge in imposing Decision No.29/Pid-Sus/TPK/2021/PN Jkt. Pst. did not fulfill the principle of justice for the community because the judge did not accommodate the elements of the loss suffered by the community and the public's disappointed response to the perpetrators of the criminal act of corruption was instead used as an excuse to reduce the victim's sentence. In addition, the use of public insults as a mitigating reason for the defendant can trigger an imbalance in previous cases. Public condemnation should have given a warning to the panel of judges in considering the aggravating circumstances of the defendant. This is because the community feels aggrieved by the defendant's behavior.

Keywords : Korupsi, Reasons for Criminal Compliance, Covid-19.